



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

- Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 936);
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melinungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

12. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.040.202.200.000,00 (satu triliun empat puluh miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp54.689.059.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.182.059.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp6.610.000.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp7,500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pajak Air Rp3,000,000.00 (tiga juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp790,000,000.00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1,300,000,000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); dan

- j. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
- a. retribusi Jasa Umum Rp 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
 - b. retribusi Jasa Usaha Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. retribusi Perizinan Tertentu Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang merupakan bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:
- a. hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp699.940.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. jasa Giro Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. pendapatan bunga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak daerah Rp85,000,000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - g. pendapatan dari Pengembalian Rp1.510.600.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - h. pendapatan BLUD Rp11.414.741.000,00 (sebelas miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- i. pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp6.871.778.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp964.013.141.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp901.365.250.200,00 (sembilan ratus satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62,647,890,800.00 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. dana Perimbangan Rp846.513.703.200,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp327.279.844.200,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp392.551.408.000,00 (tiga ratus sembilan puluh

- dua miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah);
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp63.369.996.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp63.312.455.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp3.893.265.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Dana Desa Rp50.958.282.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang terdiri dari:
- a. pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp10,620,084,200.00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - b. pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp6,249,389,300.00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - c. pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp35,052,437,200.00 (tiga puluh lima miliar lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - d. pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp50,651,700.00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - e. pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp10,675,328,400.00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari Pendapatan hibah.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1,035,202,200,000.00 (satu triliun tiga puluh lima miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp705.190.661.100,00 (tujuh ratus lima miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.857.204.741,00 (tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.313.204.216,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.282.813.143,00 (dua

puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.737.439.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp184.236.687.066,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp117.702.499.130,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp39.829.368.315 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp5.350.793.076,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp852,860,204.00 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp442,160,000.00 (empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - g. belanja pegawai BOS Rp2.142.836.950,00 (dua miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan

- h. Belanja Pegawai BLUD Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:
- a. belanja barang Rp67.993.223.438 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - b. belanja jasa Rp156.417.127.783 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - c. belanja pemeliharaan Rp14.149.955.822 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
 - d. belanja perjalanan dinas Rp62.725.955.198 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Rp5.868.600.975 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOS Rp7.787.997.645,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD Rp9.497.441.000 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp3.652.830.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; Rp17.106.550.300,00 (tujuh belas miliar seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp523,432,843.00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) terdiri dari:
- a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp318.180.000,00 (tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp1.665.700.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - c. belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp12.753.559.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp200.819.431.680,00 (dua ratus miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.570.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp28.778.669.723,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.434.189.024,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.088.775.350,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.947.797.583,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari :
 - a. belanja modal tanah Persil Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja modal lapangan Rp13.640.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar Rp108.295.200,00 (seratus delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan Rp1.621.178.716,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- d. belanja modal alat pertanian Rp650,000,000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp5.121.712.938,00 (lima miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp861.343.800,00 (delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp6.103.357.705,00 (enam miliar seratus tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium Rp1.341.071.762,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
 - i. belanja modal komputer Rp6.135.311.780 (enam miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - j. belanja modal alat eksplorasi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu Rp1.446.300.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga Rp30,000,000.00 (tiga puluh juta rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp3.993.597.822,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri dari;
- a. belanja modal bangunan gedung Rp54.467.406.624,00 (lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah); dan

- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp1.966.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri dari:
- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp67.047.323.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air Rp21.113.890.350,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja modal instalasi Rp7.905.562.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal jaringan Rp1.022.000.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal biota perairan Rp5,000,000.00 (lima juta rupiah);
 - c. belanja modal aset tidak berwujud Rp88.600.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp2.714.197.583,00 (dua miliar tujuh ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp124.192.107.220,00 (seratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.941.407.220,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
 - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan bantuan keuangan ke pemerintah desa.

Pasal 17

- Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp16,500,000,000.00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp21,500,000,000.00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah yang merupakan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp16,500,000,000.00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp16,500,000,000.00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 29 Desember 2021
BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 85

LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.018.702.200.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.689.059.000,00
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	130.000.000,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	130.000.000,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	130.000.000,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.000.000.000,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	19.000.000,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.000.000,00
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.000.000,00
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.000.000,00
4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.000.000,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	140.500.000,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000,00
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	15.000.000,00
4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	15.000.000,00
4.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	6.610.000.000,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	7.500.000,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	7.500.000,00
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	7.500.000,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	3.000.000,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	3.000.000,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	3.000.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	790.000.000,00
4.1.01.14.05.	Pajak Batu Apung	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung	10.000.000,00
4.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil	270.000.000,00
4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	270.000.000,00
4.1.01.14.24.	Pajak Pasir Kuarsa	10.000.000,00
4.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa	10.000.000,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.300.000.000,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	1.300.000.000,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	1.300.000.000,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	507.000.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	367.000.000,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00
4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	25.000.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	70.000.000,00
4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	70.000.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	70.000.000,00
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	32.182.059.000,00
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	699.940.000,00
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	699.940.000,00
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	699.940.000,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.500.000.000,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	85.000.000,00
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000,00
4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000,00
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	1.510.600.000,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.600.000,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.600.000,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	11.414.741.000,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	11.414.741.000,00
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	11.414.741.000,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.871.778.000,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.000,00
4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	964.013.141.000,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	901.365.250.200,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	846.513.703.200,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	327.279.844.200,00
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	61.475.554.000,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	10.970.553.000,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.198.000,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	102.474.635.600,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	149.000.449.600,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.377.022.000,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	54.606.000,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	392.551.408.000,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	392.551.408.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.369.996.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.378.240.000,00
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.316.918.000,00
4.2.01.01.03.0006.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.045.047.000,00
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.887.084.000,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.169.526.000,00
4.2.01.01.03.0018.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	736.358.000,00
4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	16.892.572.000,00
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	94.159.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.671.138.000,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.560.000.000,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.752.489.000,00
4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.245.941.000,00
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000,00
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	537.095.000,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.312.455.000,00
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.078.630.000,00
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	560.000.000,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.031.809.000,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.113.000.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.337.965.000,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.048.840.000,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	271.110.000,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.676.162.000,00
4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00
4.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	117.041.000,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.021.849.000,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00
4.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	606.600.000,00
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	638.373.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	3.893.265.000,00
4.2.01.02.01.	DID	3.893.265.000,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	3.893.265.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	50.958.282.000,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	50.958.282.000,00
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	50.958.282.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.647.890.800,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	62.647.890.800,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.647.890.800,00
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.620.084.200,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.249.389.300,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.052.437.200,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	50.651.700,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.675.328.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.018.702.200.000,00
5.	BELANJA DAERAH	1.035.202.200.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	705.190.661.100,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	350.857.204.741,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	184.236.687.066,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	133.919.072.066,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	126.257.367.066,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.661.705.000,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.401.640.000,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.401.640.000,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.870.151.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.870.151.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.569.767.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.897.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	672.527.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.264.266.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.201.718.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	62.548.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.810.091.000,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.521.874.000,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	288.217.000,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	132.230.000,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	132.230.000,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.622.000,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.925.000,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.697.000,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.040.405.000,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.133.153.000,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	907.252.000,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	302.815.000,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	283.226.000,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.589.000,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	908.628.000,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	849.863.000,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	58.765.000,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	117.702.499.130,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	38.320.572.638,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	36.376.458.407,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.944.114.231,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.802.325.320,00
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.355.819.690,00
5.1.01.02.02.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	446.505.630,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.035.194.500,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.035.194.500,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.498.969.300,00
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.498.969.300,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	72.045.437.372,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	68.877.257.581,00
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.168.179.791,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.829.368.315,00
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.031.809.000,00
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	20.031.809.000,00
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.337.965.000,00
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	1.337.965.000,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.113.000.000,00
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.113.000.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.837.582.783,00
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.837.582.783,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	15.109.420.932,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.819.050.932,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	197.740.000,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	92.630.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	399.590.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	387.590.600,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	5.350.793.076,00
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	386.820.000,00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	386.820.000,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.597.600,00
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.597.600,00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64.221.840,00
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64.221.840,00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	560.889.000,00
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	560.889.000,00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.396.900,00
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.396.900,00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	127.185.736,00
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	39.972.264,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	928.368,00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.785.104,00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	83.500.000,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.295.000.000,00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.295.000.000,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	852.860.204,00
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.567.440,00
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.567.440,00
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.082.400,00
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.082.400,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.266.382,00
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.266.382,00
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	523.136,00
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	523.136,00
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	727,00
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	727,00
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	83.816.346,00
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	83.816.346,00
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.330,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.330,00
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	625.350.000,00
5.1.01.05.10.0006.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	625.350.000,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	442.160.000,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	109.200.000,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	109.200.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	332.960.000,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	332.960.000,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	2.142.836.950,00
5.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	2.142.836.950,00
5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	2.142.836.950,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	318.313.204.216,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	67.993.223.438,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	67.960.433.948,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	190.000.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.186.842.875,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.850.389.927,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	18.960.000,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	561.652.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	11.640.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.528.524.925,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.194.189.120,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	360.500.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.318.446.878,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.705.058.777,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	641.065.517,00
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	133.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.849.194,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	648.298.218,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.182.870.785,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	550.000.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	163.900.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	335.681.500,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.946.654.609,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.250.519.561,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	410.340.993,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	48.000.000,00
5.1.02.01.01.0049.	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.813.180.359,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.969.861.000,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.099.318.570,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	15.820.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.485.568.600,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	82.000.000,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.400.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	481.050.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	388.102.000,00
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.100.000,00
5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga	70.000.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	120.250.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	520.425.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	86.600.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	797.523.540,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	528.350.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	32.789.490,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	32.789.490,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	156.417.127.783,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	124.526.260.679,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.871.485.100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.187.128.500,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	43.200.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.702.260.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	192.100.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	119.500.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.806.500.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.526.350.284,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.042.800.000,00
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	443.700.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.384.040.533,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.465.100.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.825.900.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.062.000.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	444.000.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	732.000.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	164.000.000,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	909.500.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	38.000.000,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	877.877.763,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	13.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	62.800.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.041.000.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.197.159.567,00
5.1.02.02.01.0057.	Belanja Jasa Operator Kapal	800.000.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	143.650.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.014.362.156,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	5.038.569.249,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	740.900.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.569.826.500,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	256.320.000,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	141.000.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.003.410.200,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	1.211.518.820,00
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	259.402.007,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.301.286.074,00
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.424.277.400,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.819.651.474,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	31.047.000,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.310.200,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.589.225.180,00
5.1.02.02.04.0003.	Belanja Sewa Excavator	40.000.000,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	17.000.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	592.060.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.258.180,00
5.1.02.02.04.0038.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.500.000,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	747.832.000,00
5.1.02.02.04.0045.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	3.300.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.523.285.000,00
5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	103.780.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	238.000.000,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	88.000.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	102.000.000,00
5.1.02.02.04.0145.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	36.600.000,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.000.000,00
5.1.02.02.04.0406.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	48.110.000,00
5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric	1.500.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.481.365.850,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	851.241.000,00
5.1.02.02.05.0002.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	260.000.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	151.090.000,00
5.1.02.02.05.0014.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	7.200.000,00
5.1.02.02.05.0030.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	136.393.760,00
5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	244.000.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	617.204.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	935.278.710,00
5.1.02.02.05.0049.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	36.958.380,00
5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	242.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	75.500.000,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	20.500.000,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	55.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.391.680.000,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	80.000.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	140.000.000,00
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	3.000.000,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.200.000,00
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	816.600.000,00
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	660.000.000,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.000.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	90.000.000,00
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.699.880.000,00
5.1.02.02.08.0033.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	95.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.265.000.000,00
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	400.000.000,00
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	380.000.000,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	185.000.000,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	135.000.000,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.651.810.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.082.110.000,00
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	287.800.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	281.900.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	14.149.955.822,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.930.682.955,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.154.734.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	204.110.000,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	47.800.000,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	275.440.000,00
5.1.02.03.02.0050.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	408.270.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.02.0062.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0086.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	55.000.000,00
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	48.000.000,00
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.514.580,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	654.821.040,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	804.443.335,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	177.500.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.000.000,00
5.1.02.03.02.0126.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0293.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	7.000.000,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	97.050.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26.000.000,00
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	348.000.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	43.000.000,00
5.1.02.03.02.0446.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	240.000.000,00
5.1.02.03.02.0502.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	100.000.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.354.189.167,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.939.601.047,00
5.1.02.03.03.0002.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	60.000.000,00
5.1.02.03.03.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	22.000.000,00
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	422.576.000,00
5.1.02.03.03.0007.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.600.000.000,00
5.1.02.03.03.0009.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	330.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.273.012.100,00
5.1.02.03.03.0011.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0020.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat	40.000.000,00
5.1.02.03.03.0021.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	80.000.000,00
5.1.02.03.03.0030.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0041.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	192.000.000,00
5.1.02.03.03.0042.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	20,00
5.1.02.03.03.0050.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0055.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	25.000.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.689.850.000,00
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	2.289.350.000,00
5.1.02.03.04.0015.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	192.000.000,00
5.1.02.03.04.0035.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	144.000.000,00
5.1.02.03.04.0103.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	4.000.000,00
5.1.02.03.04.0123.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	57.500.000,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	175.233.700,00
5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	175.233.700,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	62.725.955.198,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.686.167.198,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.468.912.073,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.674.797.000,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	542.458.125,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	39.788.000,00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	39.788.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.660.900.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.235.500.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	450.900.000,00
5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa	709.600.000,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	75.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	425.400.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	266.100.000,00
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	159.300.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.868.600.975,00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.868.600.975,00
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.868.600.975,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.497.441.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.497.441.000,00
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.497.441.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	21.282.813.143,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.652.830.000,00
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.652.830.000,00
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.652.830.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.106.550.300,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.519.874.800,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.315.000.000,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	204.874.800,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.711.377.500,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.576.877.500,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.134.500.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.875.298.000,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	440.000.000,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.435.298.000,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	14.737.439.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	318.180.000,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	318.180.000,00
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	318.180.000,00
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.665.700.000,00
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.585.700.000,00
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.585.700.000,00
5.1.06.02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00
5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	12.753.559.000,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.753.559.000,00
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.753.559.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	200.819.431.680,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	15.570.000.000,00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	15.570.000.000,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	1.930.000.000,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.930.000.000,00
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	13.640.000.000,00
5.2.01.01.03.0007.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	6.890.000.000,00
5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	6.395.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.01.01.03.0019.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	355.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.778.669.723,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	108.295.200,00
5.2.02.01.02.	Belanja Modal Alat Besar Apung	6.600.000,00
5.2.02.01.02.0006.	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	6.600.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	101.695.200,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	72.000.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	29.695.200,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	1.621.178.716,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.621.178.716,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	115.000.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	515.000.000,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	561.532.000,00
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	429.646.716,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	210.500.000,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	167.500.000,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	167.500.000,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	17.500.000,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	17.500.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	25.500.000,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	25.500.000,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	650.000.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	650.000.000,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	650.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.127.712.938,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.564.823.172,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	116.000.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.448.823.172,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.256.500.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	623.900.000,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	4.600.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	413.900.000,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	12.000.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.202.100.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.306.389.766,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	616.770.000,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	76.514.766,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	407.105.000,00
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	47.000.000,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	29.000.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	130.000.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	861.343.800,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	432.200.000,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.200.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	75.000.000,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	179.000.000,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	50.000.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	125.000.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	379.143.800,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	379.143.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	50.000.000,00
5.2.02.06.04.0006.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	50.000.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.103.357.705,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.103.357.705,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.632.114.263,00
5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.618.110,00
5.2.02.07.01.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	715.076.534,00
5.2.02.07.01.0021.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	259.248.948,00
5.2.02.07.01.0024.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.494.299.850,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.341.071.762,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	370.267.862,00
5.2.02.08.01.0019.	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	52.478.085,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	123.000.000,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	194.789.777,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	775.000.000,00
5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	200.000.000,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	575.000.000,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	195.803.900,00
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	195.803.900,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	6.135.311.780,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	4.942.938.000,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	263.350.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	986.000.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.693.588.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.192.373.780,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	34.000.000,00
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	125.000.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	249.600.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	368.400.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	415.373.780,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	150.000.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	150.000.000,00
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	150.000.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.446.300.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	366.300.000,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	366.300.000,00
5.2.02.18.03.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.080.000.000,00
5.2.02.18.03.0002.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	1.080.000.000,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.000.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.000.000,00
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	30.000.000,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.993.597.822,00
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.993.597.822,00
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.993.597.822,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.434.189.024,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	54.467.406.624,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.056.198.124,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.616.000.000,00
5.2.03.01.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	491.600.000,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	356.531.000,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	19.281.525.800,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	291.000.000,00
5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.663.200.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.753.581.324,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	96.000.000,00
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.639.600.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	201.600.000,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.081.760.000,00
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	404.000.000,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	179.800.000,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.411.208.500,00
5.2.03.01.02.0003.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	2.801.502.500,00
5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.609.706.000,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.966.782.400,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.966.782.400,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	1.966.782.400,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.088.775.350,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	67.047.323.000,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	63.936.123.000,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	35.450.489.000,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	28.485.634.000,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	3.111.200.000,00
5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	3.111.200.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	21.113.890.350,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.031.386.000,00
5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	488.291.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	543.095.000,00
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.257.600.000,00
5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	810.600.000,00
5.2.04.02.04.0007.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	447.000.000,00
5.2.04.02.05.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	17.626.016.000,00
5.2.04.02.05.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	17.626.016.000,00
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	900.000.000,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	900.000.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	298.888.350,00
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	148.888.350,00
5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	150.000.000,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	7.905.562.000,00
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.679.800.000,00
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.679.800.000,00
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	822.800.000,00
5.2.04.03.03.0002.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	640.500.000,00
5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	182.300.000,00
5.2.04.03.04.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	1.268.562.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.04.03.04.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	1.268.562.000,00
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	20.000.000,00
5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000,00
5.2.04.03.09.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	4.114.400.000,00
5.2.04.03.09.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	4.114.400.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	1.022.000.000,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	20.000.000,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	20.000.000,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.002.000.000,00
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.002.000.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.947.797.583,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	140.000.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	75.000.000,00
5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	75.000.000,00
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	65.000.000,00
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	65.000.000,00
5.2.05.04.	Belanja Modal Biota Perairan	5.000.000,00
5.2.05.04.01.	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	5.000.000,00
5.2.05.04.01.0001.	Belanja Modal Ikan Budidaya	5.000.000,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	88.600.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	88.600.000,00
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	88.600.000,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.714.197.583,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.714.197.583,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.714.197.583,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	124.192.107.220,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	122.941.407.220,00
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	122.941.407.220,00
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.983.125.220,00
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.983.125.220,00
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.958.282.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.958.282.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.035.202.200.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.500.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	16.500.000.000,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.500.000.000,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.500.000.000,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	21.500.000.000,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	21.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	21.500.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.500.000.000,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	16.500.000.000,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI